

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya jumlah penduduk yang mengakibatkan pula meningkatnya pola perilaku konsumtif dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah produksi timbunan sampah. Seiring dengan adanya aktivitas manusia, konsekuensi meningkatnya jumlah timbunan sampah akan berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Menjadi persoalan penting bagi pengadaan pengelolaan sampah diarah pelayanan publik yang dimana pemerintah bertanggungjawab atas penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan kewenangan Pemerintahan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah. Terealisasinya pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik, yaitu pemerintah bertanggungjawab dengan melibatkan pihak ketiga dan partisipasi masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah.¹

Namun, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sampah adalah kapasitas pengolahan sampah yang belum optimal dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengolahan sampah yang baik. Studi oleh Supriyadi (2020) dalam jurnal "*Environmental Management and Sustainability*" menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan dukungan dari Pemerintah Daerah sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Pencemaran air dan tanah akibat pelepasan zat organik, anorganik, dan senyawa polutan lain yang terkandung didalam sampah, pencemaran udara akibat partikel *tersuspensi*, pencemaran bau akibat dekomposisi sampah, dan

¹ Nurikah, H.E Rakhmat Jajuli, and Eki Furqon, "Tata Kelola Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Serang," *Gorontalo Law Reviw* 5, no. 2 (2022): 434-42.

bahkan pencemaran laut akibat limpasan air. Mengakibatkan faktor risiko kesehatan masyarakat berupa penyakit kulit, penyakit pernapasan, gangguan tenggorokan, dan penyakit lainnya meningkat bagi masyarakat.² Perilaku penangan sampah secara konvensional ini tentunya akan memberi dampak lanjutan, yaitu pada masalah pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara yang kemudian akan memberi dampak lanjutan, seperti terjadinya banjir, peningkatan faktor penyakit, dan beberapa dampak lanjutan lainnya.³ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib mengkaji potensi dampak penting terhadap lingkungan, termasuk dampak terhadap kesehatan masyarakat. Ketentuan ini memberikan landasan hukum sekaligus arah kebijakan bahwa perlindungan kesehatan masyarakat merupakan bagian integral dari instrumen pengelolaan lingkungan hidup.⁴

Selain itu, peran penting dari DAS sebagai entitas perencanaan dan pengelolaan sumber daya semakin terlihat ketika DAS tidak dapat menjalankan fungsi secara maksimal sebagai pengatur aliran air dan penjamin mutu air, yang tampak dari munculnya masalah banjir, kekeringan, dan tingginya sedimentasi. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah wilayah tangkapan air hujan yang akan mengalir ke sungai yang bersangkutan. Perubahan yang terjadi secara fisik di daerah aliran sungai akan memengaruhi secara langsung kemampuan daerah tersebut dalam menahan banjir. Dalam perjalanan waktu, peristiwa-peristiwa ini merupakan fenomena yang muncul akibat terganggunya fungsi daerah

² Putri Nilam Sari, Departemen Kesehatan Masyarakat, and Fakultas Kesehatan Masyarakat, "Metodologi Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Public Health Methodology in Environmental Impact Assessment (EIA) Study" 06, no. 2 (2025): 2025, <http://jk3l.fkm.unand.ac.id/index.php/jk3l/index>.

³ Andika Wahyudi Gani, Ririn Nurfaathirany Heri, and Riswandi, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK) Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba," *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 10, no. 3 (2023): 189–98.

⁴ Nilam Sari, Kesehatan Masyarakat, and Kesehatan Masyarakat, "Metodologi Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Public Health Methodology in Environmental Impact Assessment (EIA) Study."

aliran sungai sebagai suatu sistem hidrologi yang melibatkan kompleksitas dari berbagai proses yang terjadi di daerah tersebut.⁵

Sebenarnya, sering kali daerah di sekitar sungai digunakan sebagai lokasi pembuangan akhir untuk sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, terutama sampah rumah tangga. Tingkah laku penduduk setempat yang masih kurang menyadari betapa krusialnya menjaga kawasan sekitar sungai dapat berujung pada dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kualitas air, yang merupakan sumber kehidupan bagi manusia. Apabila masyarakat terus menerus mengabaikan risiko yang muncul, akan mengakibatkan dampak lanjutan seperti banjir dan menurunnya kualitas air yang menjadi sumber kehidupan bagi manusia untuk sektor pertanian, besar kemungkinan situasi ini akan semakin parah. Apabila dalam lingkungan manusia muncul suatu peristiwa yang mengancam ekosistem manusia akibat tindakan yang dilakukan, maka hal itu disebut sebagai pencemaran lingkungan. Dan ketika banjir terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari aktivitas manusia seperti pembuangan sampah ke sungai dan penebangan hutan, serta jika dampaknya mengancam keberadaan manusia sebagai makhluk hidup, maka jelas bahwa isu banjir ini merupakan isu pencemaran lingkungan hidup.⁶

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mencatat sedikitnya 24 desa dan kelurahan di delapan kecamatan terdampak banjir setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Banjir Cirebon ini terjadi akibat curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang cukup lama, sehingga menyebabkan sejumlah sungai dan saluran air meluap ke permukiman warga. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cirebon, Hadi Eko, menjelaskan bahwa hujan deras tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon, tetapi juga di daerah hulu, yakni Kabupaten Kuningan. Kondisi tersebut membuat debit air sungai meningkat secara signifikan dan melampaui kapasitas tampung di sejumlah titik aliran air.

⁵ Sudarmara, O. 2012. "Optimasi Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Manado Dengan Metode AHP." *Media Engineering* Vol. 2, No. 4 : 232.

⁶ Susilo, Rachmat K. Dwi. *Sosiologi Lingkungan*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008). 16.

Menurut Eko, banjir yang melanda wilayah Cirebon ini dipicu oleh luapan beberapa sungai utama dan saluran air. Ia menjelaskan, ketidakmampuan sungai menampung debit air tersebut disebabkan oleh penyempitan badan sungai serta sedimentasi yang cukup parah. Kondisi ini diperparah oleh berbagai faktor lingkungan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, setidaknya terdapat tiga indikator utama penyebab banjir di Kecamatan Sumber, yakni alih fungsi lahan, sedimentasi sungai, serta penumpukan sampah di aliran sungai.⁷

Selain faktor curah hujan yang tinggi, BPBD Kabupaten Cirebon juga menyoroti kondisi sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Pendangkalan ini membuat daya tampung sungai berkurang, sehingga air lebih mudah meluap ketika hujan deras terjadi dalam waktu lama. Di sisi lain, sistem drainase yang belum optimal di beberapa titik turut memperparah kondisi banjir di Kabupaten Cirebon. Kombinasi antara hujan deras, sedimentasi sungai, serta saluran drainase yang belum berfungsi maksimal menjadi faktor utama meluasnya genangan air di sejumlah wilayah. Akibatnya, air tidak dapat mengalir dengan cepat menuju sungai besar atau saluran pembuangan utama, sehingga menggenangi jalan, rumah warga, hingga fasilitas umum.⁸

Wilayah terdampak banjir di Kabupaten Cirebon tersebar di delapan kecamatan, yakni Kecamatan Sumber, Talun, Plumbon, Tengah Tani, Mundu, Weru, Kedawung, dan Gunungjati. Genangan air yang merendam kawasan perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi perhatian tersendiri karena berdampak pada aktivitas pelayanan publik. Sejumlah pegawai dan masyarakat dilaporkan mengalami kesulitan akses akibat jalan yang tergenang air. BPBD menilai perlu adanya upaya bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran air, mengurangi sedimentasi

⁷ Mahardika, Devto. "Banjir Cirebon, Alih Fungsi Lahan dan Sedimentasi Sungai Disorot." *Detikjabar*. Diakses 5 Januari 2026. [Banjir Cirebon, Alih Fungsi Lahan dan Sedimentasi Sungai Disorot](#).

⁸ Merta, Putu. "Banjir Cirebon, BPBD Ungkap Faktor Penyebabnya: Bukan Hanya Hujan Deras." *Liputan 6*. Diakses 5 Januari 2026. [Banjir Cirebon, BPBD Ungkap Faktor Penyebabnya: Bukan Hanya Hujan Deras](#).

sungai, serta memperbaiki infrastruktur drainase agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap musim hujan⁹

Fiqih siyasah dusturiyah, yaitu ilmu yang mengkaji tentang negara dan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar, Peraturan Daerah dan sebagainya.¹⁰ Menurut Abdul Wahab Khallaf *siyasah* adalah Pegaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan yang ada di masyarakat.¹¹ Maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah harus ditaati guna mengelolaa sampah yang berkelanjutan, efektif, dan ramah lingkungan, serta meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Untuk mengatur suatu daerah agar lebih baik dari sebelumnya, maka diperlukan aturan-aturan hukum atau kebijakan untuk menata dan membentuk tanggung jawab pemerintah terhadap pengelolaan sampah yang ada di dalam suatu daerah khususnya Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. Dalam *fiqih siyasah*, para ulama menyatakan bahwa pemimpin atau kepala negara di sebut ulil amri yang berarti pemegang kekuasaan. Salah satu pemegang kekuasaan di Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah guna menuju kemaslahatan masyarakat adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

Dalam penelitian sebelumnya membahas tata kelola pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Misalnya, penelitian oleh Nurikah (2022) yang mengkaji pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Serang. Menunjukkan bahwa kebijakan publik sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat. Demikian pula penelitian oleh Leny Julia Lingga dkk (2024) yang mengkaji tantangan pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk dampak urbanisasi dan

⁹ Kusumawardhani, Rina. "Curah Hujan Tinggi dan Sungai Meluap, Banjir Genangi 8 Kecamatan di Cirebon." *InBerita*. Diakses 5 Januari 2026. [Curah Hujan Tinggi dan Sungai Meluap, Banjir Genangi 8 Kecamatan di Cirebon – INBERITA. Info dan Berita Terkini.](#)

¹⁰ Ahmad Nuris Sholeh, "Perilaku Masyarakat Pemilih Pada Pilkadaes Serentak Tahun 2019 Perspektif Fiqh Siyasah Di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi", 2020.

¹¹ Bakhtiar Efendi et al., "Siyasah Syariah" 5, no. 2 (2022): 112–27.

perilaku konsumtif terhadap peningkatan volume sampah. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya pendekatan sistematis dan kebijakan berbasis data dalam pengelolaan TPA.

Meski penelitian mengenai pengelolaan sampah banyak berkembang, namun belum banyak yang mengkaji secara mendalam mengenai aspek kepatuhan hukum, efektivitas kebijakan daerah, dan tantangan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara teknis dan administratif serta relevansinya dengan *fiqih siyasah dusturiyah*.

Secara teoritis, penelitian ini bertumpu pada 3 kerangka utama. Pertama, Pelayanan Publik oleh Moenir adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya,¹² yang dilakukan instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dukungan pemerintah mempunyai korelasi yang paling kuat terhadap adopsi inovasi. Mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah pada Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban menjamin terselenggaranya suatu tata kelola sampah yang baik dan kemudian diperkuat Pasal 6 yang menyebutkan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat, menyediakan fasilitas sarana dan prasarana, mengembangkan dan menerapkan teknologi/inovasi bahkan mengadopsi kebijakan lokal, dan mengkoordinasikan semua *stake holder* dalam pengelolaan sampah agar tercapai lingkungan yang sehat yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.¹³ Kedua, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menurut pendapat Bachsan Mustafa dimaksudkan sebagai ‘*asas hukum*’, yaitu suatu asas yang menjadi

¹² Prasodjo, Tunggal, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 7.

¹³ Sri Listyarini and Lina Warlina, “Pengaruh Sosialisasi, Kondisi Sosial Ekonomi, Serta Dukungan Pemerintah Terhadap Adopsi Inovasi Pengelolaan Sampah Organik The Effect of Socialization, Socio-Economic Conditions and Government Support on The Adoption of Organic Waste Innovation” 9, no. 1 (2023): 113–26.

dasar suatu kaidah hukum,¹⁴ sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, menuntut agar setiap tindakan pemerintah termasuk dalam pengelolaan sampah, dilakukan secara profesional, bertanggungjawab, dan sesuai norma hukum. Ketiga, Pembangunan Berkelanjutan menurut Budimanta adalah Suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang, harus memperhatikan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.¹⁵ Perluasan infrastruktur pengelolaan sampah yang efisien, promosi gaya hidup berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak langsung dari perilaku sehari-hari terhadap lingkungan menjadi kunci untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Transformasi ini tidak hanya menguntungkan lingkungan, tetapi juga merupakan investasi dalam kesehatan masyarakat.¹⁶

Dengan landasan teoritis tersebut, diharapkan penelitian ini tidak hanya memperkuat diskursus akademik tentang pengelolaan lingkungan hidup, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi perbaikan tata kelola sampah di tingkat daerah, khususnya dalam menghadapi tekanan regulatif dan tuntutan keberlanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode studi kasus yang difokuskan pada pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti menggali secara mendalam persepsi, pengalaman, serta peran dan tanggung jawab dinas lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah sebagai objek utama analisis.

¹⁴ Cekli, S Pratiwi, dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: LeIP, 2020), 14.

¹⁵ Heri Setia Putra, dkk, *Pembangunan Berkelanjutan*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025), 79.

¹⁶ Arief Budi Pratomo et al., "Sosialisasi Transformasi Lingkungan Dan Kesadaran Dalam Mendorong Praktik Pengelolaan Sampah Yang Berkelanjutan" 2, no. 01 (2023): 45–56, <https://doi.org/10.58812/ejimcs.v2i01>.

Melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan dinas terkait, dan analisis peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah bagi pemerintah daerah dalam pembangunan hukum lingkungan daerah, serta rekomendasi kebijakan berbasis hukum, dan realitas sosial.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Terjadi peningkatan jumlah timbulan sampah di Kabupaten Cirebon seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pola konsumtif masyarakat.
- b. Kapasitas pengolahan sampah yang belum optimal dan rendahnya partisipasi masyarakat.
- c. Penumpukan sampah dan sedimentasi mengakibatkan terjadinya banjir di Kabupaten Cirebon.
- d. Pemerintah Kabupaten Cirebon, khususnya Dinas Lingkungan Hidup menghadapi tantangan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam, maka ruang lingkup kajian dibatasi pada hal-hal berikut:

- a. Analisis terhadap peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah yang berdampak pada lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022.
- b. Studi kasus difokuskan di Kabupaten Cirebon sebagai lokasi utama terjadinya banjir.
- c. Pendekatan yang digunakan adalah empiris dengan metode studi kasus melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen hukum.
- d. Penelitian fokus pada tata kelola, kebijakan, dan tanggung jawab hukum pemerintah daerah.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022?
- b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup?
- c. Bagaimana mengatasi *problem* pengelolaan sampah dalam tinjauan *fiqih siyash dusturiyah* di Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui

pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Menganalisis cara mengatasi *problem* pengelolaan sampah dalam tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* di Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum lingkungan hidup, khususnya dalam konteks pengelolaan sampah di tingkat daerah.
- b. Menyediakan landasan akademik untuk menilai efektivitas kebijakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022.
- c. Mengintegrasikan teori pelayanan publik, asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan pembangunan keberlanjutan lingkungan dalam satu kerangka analisis hukum yang komprehensif.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.

- b. Menyediakan data analisis lapangan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
- c. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan memaparkan beberapa karya yang relevan dengan topik penelitian yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, karya Marlina, yang berjudul *"Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat untuk Mendukung SDGs Tahun 2030 di Kota Makassar."* Penelitian ini mengkaji efektivitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan 11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan observasi lapangan dan wawancara masyarakat serta pengelola sampah. Temuan utama pada penelitian ini adalah Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan sampah, namun masih terdapat kendala dalam edukasi dan dukungan kelembagaan.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun, perbedaan penelitian Marlina berfokus pada pendekatan komunitas dan SDGs, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada peran dan tanggung jawab dinas terkait dalam pengelolaan sampah yang berkaitan dengan dampak lingkungan hidup.

Kedua, karya Yusa Eko Saputro, Kismartini, Syafrudin, yang berjudul *"Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah."* Penelitian ini menganalisis pengelolaan bank sampah dari aspek teknis,

¹⁷ Marlina, "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat untuk Mendukung SDGs Tahun 2030 di Kota Makassar." *Jurnal Penelitian Geografi* 3, no. 2 (2024). 53.

kelembagaan, hukum, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan multidisipliner di Kelurahan Sidomulyo, Semarang. Temuan utama pada penelitian ini adalah Bank sampah efektif sebagai rekayasa sosial untuk mendorong pemilahan dan pengurangan sampah, namun memerlukan dukungan regulatif dan pembinaan berkelanjutan.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama-sama menyoroti pentingnya regulasi dan partisipasi dalam pengelolaan sampah. Tetapi, perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang akan dilakukan adalah tentang pengelolaan sampah yang berdampak pada lingkungan hidup oleh pemerintah daerah, bukan pengelolaan berbasis komunitas seperti bank sampah.

Ketiga, karya Jehan Ridho Izharsyah, yang berjudul *"Analisis Strategis Pemko Medan dalam Melakukan Sistem Pengelolaan Sampah dari Open Dumping ke Sanitary Landfill."* Penelitian ini menilai strategi Pemerintah Kota Medan dalam transisi sistem pengelolaan sampah. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis kebijakan dan wawancara stakeholder. Temuan utamanya transisi sistem membutuhkan komitmen politik, anggaran yang memadai, dan perubahan paradigma kelembagaan.¹⁹ Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas strategi dan tantangan kelembagaan. Perbedaannya berfokus pada strategi kebijakan, sedangkan penelitian yang akan datang mengkaji kepatuhan hukum dan tanggung jawab administratif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

Keempat, karya Rizka Rahmannita Islami dkk. Yang berjudul *"Analisis Sistem Pengelolaan Sampah di TPA Kabupaten Lumajang."* Penelitian tersebut bertujuan mengkaji sistem pengelolaan sampah di TPA Lumajang dan dampaknya terhadap lingkungan. Dengan metode studi lapangan dengan pendekatan kesehatan lingkungan. Temuan utamanya sistem open dumping

¹⁸ Yusa Eko Saputro et al., "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Bank Sampah." *Indonesian Journal of Conservation* 4, no. 1 (2025). 83-94.

¹⁹ Jehan Ridho Izharsyah, "Analisis Strategi Pemko Medan dalam Melakukan Sistem Pengelolaan Sampah dari Open Dumping ke Sanitary Landfill." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* 4, no. 2 (2021). 63.

masih dominan dan menyebabkan pencemaran air dan udara; perlu perbaikan sistem dan pengawasan.²⁰ Persamaannya sama-sama mengkaji sistem pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Perbedaan dari penelitian yang akan datang lebih menekankan aspek hukum dan tanggung jawab pemerintah daerah, bukan hanya dampak teknis lingkungan.

Kelima, karya Ayu Gita Alit Srinadi dan Allan Mustafa Umami "*Pertanggungjawaban Pengelola TPA terhadap Pencemaran Udara yang Berdampak pada Kesehatan Masyarakat.*" Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum pengelola TPA atas pencemaran udara. Menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Temuan utamanya pengelola TPA dapat dimintai pertanggungjawaban hukum jika terbukti lalai dalam pengelolaan yang menyebabkan pencemaran.²¹ Persamaannya sama-sama menyoroti aspek tanggung jawab hukum dalam pengelolaan sampah. Perbedaannya penelitian ini lebih fokus pada aspek pidana dan pencemaran udara, sedangkan penelitian yang dilakukan menekankan pada kepatuhan administratif dan kebijakan daerah.

Keenam, karya Ratna Risandi, Hery Nariyah, dan Nursahidin "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara Terminal Weru)." Penelitian ini menganalisis kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang memfokuskan pengelolaan sampah di Tempat Penampungan Sampah (TPS) pada pedagang pasar di Terminal Weru. Dengan jenis penelitian kualitatif wawancara mendalam dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan observasi langsung di TPS Terminal Weru.²² Persamaannya adalah menyoroti kebijakan

²⁰ Rizka Rahmannita Islami et al., "Analisis Sistem Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Lumajang." *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 22, no. 2 (2023). 42-67.

²¹ Ayu Gita Alit Srinadi dan Allan Mustafa Umami, "Pertanggungjawaban Pengelola TPA Terhadap Pencemaran Udara Yang Berdampak Pada Kesehatan Masyarakat." *Private Law Journal* 4, no. 3 (2024). 10-83.

²² Ratna Risandi et al., "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (Studi Kasus Tempat Penampungan Sampah Sementara Terminal Weru)." *Jurnal Publika* 7, no. 2 (2021). 107.

dari pengelolaan sampah dan di instansi yang sama, yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Perbedaannya terletak pada studi kasus penelitian ini di Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) Terminal Weru.

Ketujuh, karya Anton Sudrajat, Titi Kumala, Perdi Primansyah, Nabila Dwi Febriyanti, dan Dzikrina Nur Jannah “Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Pendirian Bank Sampah di Desa Kalitengah Cirebon.” Penelitian ini mengidentifikasi pengelolaan sampah berbasis bank sampah pada masyarakat Kalitengah Cirebon untuk mengetahui tingkat kesadaran dan partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah serta penyelesaian permasalahan sampah secara mandiri dan berkelanjutan.²³ Persamaan penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dan bertempat di Kabupaten Cirebon. Perbedaannya adalah penelitian ini hanya meneliti pengelolaan sampah berbasis bank sampah pada masyarakat saja dan tidak meneliti pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Kedelapan, karya Rohani Budi Prihatin “Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta.” Penelitian ini membandingkan keefektifan sistem pengelolaan sampah pada dua kota sekaligus, yaitu kota Cirebon dan kota Surakarta terkait daya tampung lahan di tempat pengelolaan sampah dan sistem pemrosesan akhir sampah yang dilakukan.²⁴ Persamaan penelitian ini sama-sama untuk mengetahui sistem pengelolaan sampah di Cirebon. Perbedaannya adalah penelitian ini membandingkan keefektifan sistem pengelolaan sampah pada dua tempat studi kasus yang berbeda.

Kesembilan, karya Anggi Yus Susilowati “Penanganan Sedimentasi dan Penumpukan Sampah di Pesisir Utara Kota Cirebon.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sedimentasi dan penumpukan sampah serta cara mengatasi masalah sedimentasi dan penumpukannya di pesisir utara Kota

²³ Anton Sudrajat et al., “Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Melalui Pendirian Bank Sampah di Desa Kalitengah Cirebon.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024). 53.

²⁴ Rohani Budi Prihatin, “Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang: Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta.” *Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 1 (2021). 20-86.

Cirebon dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.²⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah mengidentifikasi penyebab sedimentasi dan penumpukan sampah yang terjadi serta bagaimana cara penanganannya. Perbedaan dengan penelitian ini hanya meneliti penanganan terkait sedimentasi dan penumpukan sampah serta studi kasusnya di Kota Cirebon.

Kesepuluh, karya Alisa Nurhanifah, Dewi Rostyaningsih, dan Hardi Warsono “Kolaborasi Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Cirebon.” Penelitian ini menganalisis kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Cirebon dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Cirebon.²⁶ Persamaan pada penelitian ini adalah menjabarkan pengelolaan sampah di Cirebon disertai dengan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan sampahnya. Perbedaannya terletak pada studi kasus yang dilakukan pada penelitian ini di Kota Cirebon dan terkait kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam menjalankan pengelolaan sampah.

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, belum ada yang mengkaji peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah yang berdampak pada lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut untuk mengetahui lebih lanjut dalam membahas peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari persoalan peningkatan jumlah penduduk dan pola perilaku konsumtif masyarakat Kabupaten Cirebon yang memicu lonjakan produksi sampah rumah tangga, sehingga melebihi kapasitas

²⁵ Anggi Yus Susilowati, “Penanganan Sedimentasi dan Penumpukan Sampah di Pesisir Utara Kota Cirebon.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 6, no. 2 (2021). 32-45.

²⁶ Alisa Nurhanifah et al., “Kolaborasi Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Cirebon.” *Journal of Management and Public Policy* 13, no. 3 (2025). 294-309.

pengolahan yang ada dan menimbulkan tantangan utama berupa rendahnya partisipasi masyarakat serta ketidakefektifan infrastruktur pengelolaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) yang menempatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan prasarana sampah melalui pelayanan publik yang melibatkan pihak ketiga dan masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang bertanggungjawab atas pengelolaan sampah adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Masalah ini tidak hanya berhenti pada akumulasi sampah konvensional yang menyebabkan pencemaran tanah, air, udara, serta laut melalui zat organik, anorganik, dan limbah polutan, seperti ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mewajibkan kajian dampak lingkungan terhadap kesehatan, tetapi juga memicu dampak lanjutan seperti gangguan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat sedimentasi dan penumpukan sampah.²⁷

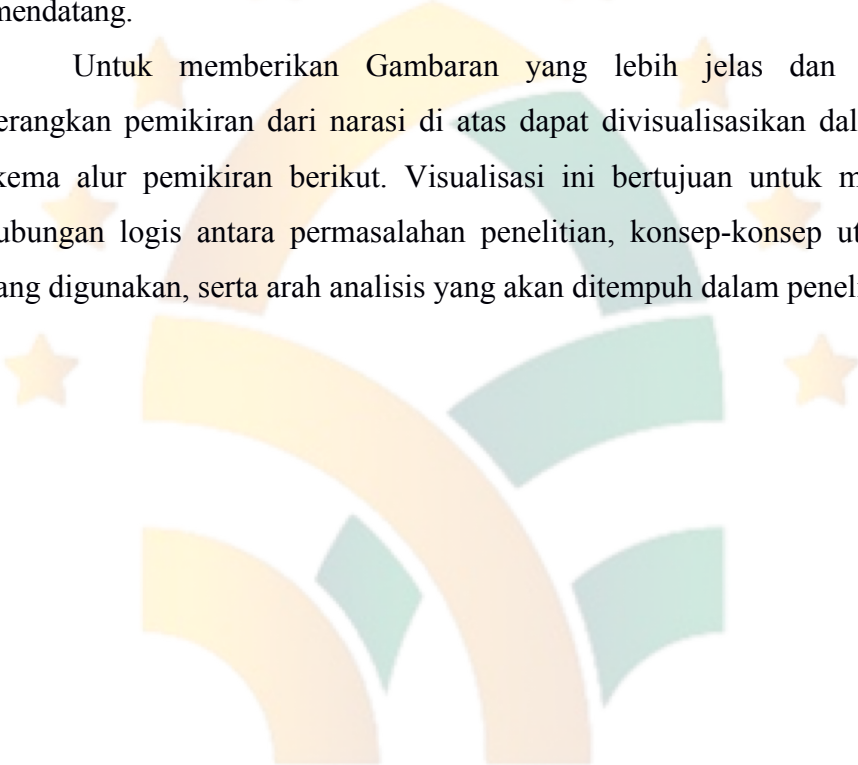
Dalam konteks hukum, pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah secara sistematis dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 sebagai instrumen hukum lokal yang mengatur tata kelola pengelolaan sampah, termasuk peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH), faktor pendukung serta faktor penghambat efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah, dan DLH sebagai *ulil amri lokal* dalam perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

Secara konseptual, penelitian ini bertumpu pada tiga teori utama. Pertama, teori pelayanan publik yang menekankan bahwa pengelolaan sampah

²⁷ Yuliana Sukarmawati, Restu Hikmah Ayu Murti, and Muhammad Abdus Salam Jawwad, "Dampak Pembuangan Sampah Terbuka (Open Dumping) Terhadap Kualitas Udara Di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Gohong," *Jurnal Envirotek* 15, no. 1 (2023): 34–48, <https://doi.org/10.33005/envirotek.v15i1.218>.

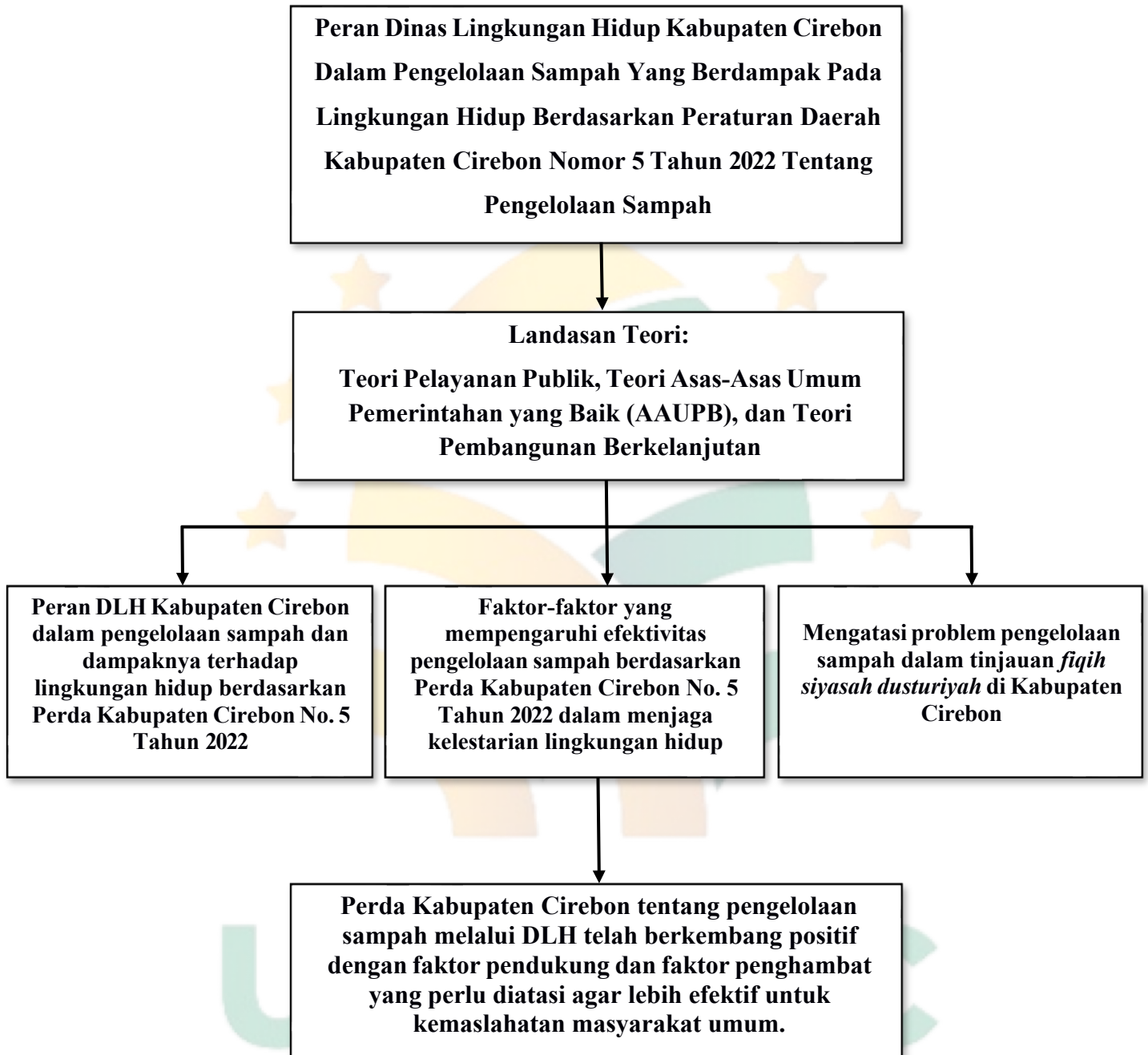
merupakan bagian dari layanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab. Kedua, teori asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yang menjadi tolak ukur dalam menilai apakah tindakan DLH telah sesuai dengan prinsip legalitas, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Ketiga, teori pembangunan berkelanjutan, yang menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan bagi generasi mendatang.

Untuk memberikan Gambaran yang lebih jelas dan sistematis, kerangka pemikiran dari narasi di atas dapat divisualisasikan dalam bentuk skema alur pemikiran berikut. Visualisasi ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan logis antara permasalahan penelitian, konsep-konsep utama, teori yang digunakan, serta arah analisis yang akan ditempuh dalam penelitian.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON



G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup: (1) Pendekatan Penelitian, (2) Jenis Penelitian, (3) Sumber Data Penelitian, (4) Teknik Pengumpulan Data, dan (5) Teknik Analisis Data.

Masing-masing komponen dijelaskan untuk menunjukkan kesesuaian antara tujuan penelitian, permasalahan yang dikaji, dan metode yang dipilih. Dengan demikian, keseluruhan proses penelitian dapat berjalan secara terarah, objektif, dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi (*mixed methods*) secara terpadu:

- a. Yuridis Normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengelolaan sampah, seperti UU No. 18 Tahun 2008 dan Perda Kabupaten Cirebon No. 5 Tahun 2022 serta *fiqih siyasah dusturiyah* untuk mengkaji peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Yuridis Empiris digunakan untuk menggali fakta-fakta di lapangan melalui sudi kasus pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon, guna memahami bagaimana regulasi tersebut diterapkan secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti peran dan tanggung jawab dinas terkait apakah sesuai dengan norma hukum untuk menjalankan peraturan daerah. Fokusnya bukan pada pengujian hipotesis, melainkan pada pemahaman konteks hukum, kelembagaan, dan sosial yang memengaruhi efektivitas kebijakan pengelolaan sampah yang berdampak pada lingkungan hidup.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan publik di Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Informan tersebut meliputi:

- 1) Wawancara dengan pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan Pengelola Tempat Pembuangan Akhir.
- 2) Observasi partisipatif di lokasi pengelolaan sampah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi dan literatur pendukung yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer, memberikan latar belakang kebijakan, serta menjadi dasar pembandingan dalam menelaah isu-isu yang dikaji secara ilmiah. Adapun dokumen yang dimaksud mencakup antara lain:

- 1) Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan sampah dan lingkungan hidup.
- 2) Jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
- 3) Berita atau arsip publik yang mendukung konteks kajian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode yang disesuaikan dengan jenis dan pendekatan penelitian. Adapun Teknik yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang dianggap kompetensi, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel namun tetap terarah sesuai dengan fokus penelitian. Adapun pihak yang diwawancara, seperti pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan pengelola TPA.

b. Observasi Partisipatif

Penelitian ini mengamati langsung sistem pengelolaan sampah, dan peran kelembagaan.

b. Studi Dokumentasi

Analisis terhadap regulasi, laporan kebijakan, dan dokumen resmi Dinas Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya seperti dokumentasi sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸ Dalam penelitian ini analisis data disederhanakan dengan tahapan-tahapan berikut:

1) Reduksi Data

Menyaring dan memilih data yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sesuai fokus kajian aspek hukum, kelembagaan, dan kebijakan pengelolaan sampah.

2) Penyajian Data

Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif dan tematik guna membantu membandingkan antara norma hukum dan praktik pengelolaan sampah secara konkret.

²⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2008). 244.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menyimpulkan berdasarkan pola-pola temuan yang konsisten dengan teori dan regulasi yang dianalisis melalui triangulasi data (wawancara, observasi, dokumen).

Dengan metode ini, peneliti diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang peran Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam proposal yang berjudul "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Dalam Pengelolaan Sampah Yang Berdampak Pada Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah." Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan permasalahan pengelolaan sampah yang berdampak pada lingkungan hidup dan menghubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah guna menganalisis peran dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Disusul dengan identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Bab ini menyajikan landasan konseptual dan teoritis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Tinjauan ini mencakup teori-teori yang relevan, seperti teori Pelayanan Publik, teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan teori Pembangunan

Berkelanjutan. Karena penelitian ini bersifat empiris, maka penyusunan kerangka teoritis diarahkan untuk mendukung analisis terhadap data lapangan yang diperoleh melalui studi kasus pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon.

Bab III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum instansi yang menjadi fokus penelitian, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Uraian mencakup latar belakang historis, struktur kelembagaan, kewenangan, program kegiatan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan pengelolaan sampah yang berdampak pada lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dikaitkan dengan teori Pelayanan Publik, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan teori Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan utama dari bab ini adalah menjawab rumusan masalah dan menunjukkan kontribusi ilmiah dari penelitian terhadap penguatan tata kelola pengelolaan sampah di tingkat daerah.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi. Kesimpulan akan memuat gambaran umum tentang peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah berdasarkan Perda Kabupaten Cirebon No. 5 Tahun 2022, faktor pendukung serta faktor penghambat dalam implementasi Perda Kabupaten Cirebon No. 5 Tahun 2022, dan *Fiqih Siyasah Dusturiyah*.

Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif (bagi pemerintah daerah), teoretis (bagi pengembangan kajian akademik), maupun rekomendatif (bagi perumusan kebijakan yang lebih partisipatif, dan berkeadilan dimasa yang akan datang).

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON